

TESIS

**KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATANNYA ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh

**MERRY RIMADINI, S.H
2320216320054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATANNYA ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

**MERRY RIMADINI, S.H.
2320216320054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. Suprpto, S.H., M.H
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Merry Rimadini, S.H.
NIM : 2320216320054
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
: Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
: NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
: JABATANNYA ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Merry Rimadini, S.H.



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

MERRY RIMADINI
2320216320054

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

7 %

Banjarmasin, 11 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

Merry Rimadini,¹ Suprpto²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab menjalankan jabatannya secara profesional, terutama dalam hal keberadaannya di wilayah tugas yang telah ditetapkan. Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2014 melarang notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah dan izin dari Majelis Pengawas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran ini masih menyisakan berbagai permasalahan dari sisi kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai dengan prinsip asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi, yaitu: lemahnya rumusan norma dalam Pasal 17 ayat (2), ketiadaan aturan pelaksana yang menjabarkan secara teknis prosedur pemberian sanksi, serta adanya perbedaan penafsiran oleh Majelis Pengawas di berbagai daerah. Selain itu, kode etik profesi yang berlaku masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan praktis secara konkret.

Penelitian ini merekomendasikan adanya perumusan ulang norma Pasal 17 disertai aturan pelaksana yang eksplisit dan sistem informasi pengawasan yang transparan. Standar pemberian sanksi perlu diatur berdasarkan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminatif. Dengan demikian, sistem pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih konsisten dan adil, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan masyarakat.

¹ NIM : 2320216320054

² Pembimbing

**KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA ATAS
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

Merry Rimadini,³ Suprpto⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Notaris, Wilayah Jabatan, Sanksi Administratif, Kepastian Hukum, Pengawasan.

Penelitian ini membahas ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum. Permasalahan muncul karena tidak adanya peraturan pelaksana yang menjelaskan lebih lanjut mekanisme, standar, dan prosedur sanksi, serta adanya disparitas penerapan di berbagai daerah yang mengakibatkan inkonsistensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakjelasan, serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan disebabkan oleh lemahnya formulasi norma, kurangnya standar nasional dalam pengawasan, lemahnya kode etik, dominasi diskresi pengawas, serta ketiadaan sistem informasi yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma dan regulasi teknis yang menjamin proporsionalitas, konsistensi, serta perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasanya.

³ NIM : 2320216320054

⁴ Pembimbing

**CLASSIFICATION AND STANDARD OF SANCTION TO A NOTARY
WHO LEAVES THE OFFICE AREA BASED ON
PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY**

By :
Merry Rimadini¹, Suprpto²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 108 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Office Area, Administrative Sanction, Legal Certainty, Supervision

This research discusses the vagueness of sanction enforcement to the Notary who leaves the office area without permission based on Article 17 of Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position, viewed from the perspective of the principle of legal certainty. The problem arises because there is no implementing regulation which explains further on the mechanism, standard, and procedure of sanction, and there is disparity in its enforcement in various regions which brings about inconsistency. The goals of this research are to identify the factors causing the vagueness, and to offer classification and standard of sanction in conformity with the principle of legal legality and justice. This is normative legal research, using statute approach and conceptual approach. Sources of data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal resources which are analyzed qualitatively. The results of the research show that the vagueness is caused by the weakness of norm formulation, lack of national standard of supervision, weakness of code of ethics, domination of discretion control, and nonexistence of transparent information system. Therefore, reform of the norms and technical regulations are needed which guarantee proportionality, consistency, and legal protection the Notary and the users of his services.

Certified by,



¹ Student Number : 2320216320054

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM**, sebagai bentuk tugas akhir dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Suprpto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.kn selaku Tim Penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Teristimewa kepada keluarga besar penulis terkhusus kepada Suamiku Ericky Nahl Adiguna yang telah memberikan seegala yang terbaik tiada henti hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis dan penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua penulis papah Suriadi Sutiyo dan almh mamah Mahrita juga seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan moril kepada penulis dan senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini;
8. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis; dan
9. Semua pihak yang membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penulisan ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarbaru, Juni 2025

Hormat Penulis,

Merry Rimadini, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KETIDAKJELASAN SANKSI BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN TANPA IZIN	
A. Peraturan Tentang Sanksi Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Izin.....	26
B. Analisis Ketidakjelasan Sanksi Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Izin.....	29
BAB III STANDAR DAN KLASIFIKASI SANKSI DALAM PERSEPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	
A. Pendekatan Yuridis Dan Analisis Kelemahan Formulasi Sanksi.....	51
B. Implikasi Ketidakjelasan Sanksi Dan Perbandingan Dengan Profesi Sejenis.....	56

C. Asas Kepastian Hukum Dan Peran Regulator Dalam Pembentukan Sanksi Terhadap Notaris.....	60
D. Usulan Perbaikan Norma Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.....	63
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

